

**Kajian yuridis terhadap tindak pidana penggelapan kendaraan  
bermotor roda dua  
( studi kasus di pengadilan negeri sukoharjo )**



Penulisan Hukum  
( Skripsi )

Disusun dan diajukan untuk  
Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum Pada  
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

**oleh :**

**Indriawan  
Nim. E0004188**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA  
2008**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Penulisan Hukum ( Skripsi )**

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHELAPAN  
KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA  
( Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sukoharjo )**

Disusun Oleh :

**INDRIAWAN**

**NIM : E. 0004188**

**Disetujui untuk Dipertahankan**

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Dr. Hartiwiningsih, S.H.,M.Hum

NIP. 131 472 287

Budi Setiyanto, S.H.

NIP. 131 586 283

**PENGESAHAN PENGUJI**

**Penulisan Hukum ( Skripsi )**

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN**

**KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA**

**( Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sukoharjo )**

**Disusun Oleh :**

**INDRIAWAN**

**NIM : E. 0004188**

**Telah diterima dan di sahkan oleh Tim Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)**

**Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret**

**pada :**

**Hari : Jum'at**

**Tanggal : 25 Juli 2008**

1. \_\_\_\_\_ ( Winarno Budyatmojo , SH. MS. )

Ketua

2. \_\_\_\_\_ ( Budi Setiyanto, S.H. )

Sekretaris

3. \_\_\_\_\_ ( Dr.Hartiwiningsih,S.H.,M.Hum. )

Anggota

**MENGETAHUI**

**Dekan**

**Mohammad Jamin, S. H., M.Hum.**

NIP 131 570 154

## MOTTO

*" Dan mintalah pertolongan ( kepada Allah ) dengan sabar dan ( mengerjakan ) shalat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu ".*

*( QS Al – Baqarah : 45 )*

*"... Sesungguhnya Aku mengingatkan kepadamu supaya kamu tidak termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan".*

*( QS Hud – 46 )*

*Rahasia kesuksesan adalah dedikasi, kerja keras, pengabdian terhadap mimpi-mimpimu, dan doa...*

*( Indriawan )*

## **PERSEMBAHAN**

*Sebuah karya yang sederhana ini penulis persembahkan kepada :*

*Dzat yang Maha Sempurna Allah SWT, Tuan Rumah alam semesta &  
Penguasa tujuh lapis langit*

*Bapak & Ibu tercinta,  
Atas semua cinta, kasih sayang, doa, harapan, dan kepercayaan yang kalian berikan untukku*

*Adikku tercinta, Agustina Dian Kusumawati*

*Teman-temanku,  
Betapa rapuhnya hidupku tanpa kalian...*

*Civitas Akademika  
Fakultas Hukum UNS*

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan hukum (Skripsi) yang berjudul “KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGELAPAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sukoharjo)”.

Penulisan Hukum ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Hukum Sebelas Maret Surakarta. Penulis mengakui bahwa selesainya penulisan hukum ini tidak terlepas dari dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Muhammad Jamin, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Bapak Ismunarno, S.H., M.Hum, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
3. Ibu Dr.Hartiwiningsih, S.H., M.Hum, dan Bapak Budi Setiyanto, S.H. selaku dosen pembimbing I dan II penulis yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dan memberikan banyak masukan serta saran demi kemajuan penulis dan sempurnanya penulisan hukum ini.
4. Bapak Kristiyadi, S.H., M.H. selaku pembimbing akademik penulis yang telah banyak memberikan motivasi kepada penulis, agar penulis selalu meningkatkan prestasi.
5. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
6. Bapak Ibu Karyawan serta staf-staf tata usaha, bagian akademik, bagian kemahasiswaan, bagian transit, bagian keamanan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
7. Bapak Nurchambali, S.H, selaku panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Sukoharjo yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk.
8. Bapak & Ibuku yang telah memberikan kasih sayangnya kepada penulis.
9. Adikku tersayang, yang telah memberiku semangat setiap harinya.
10. *My best friends* : Febri, Bebex, Ote, Astrex, Sari, Lita & Liya. "Memang kekasih adalah keindahan, tapi sahabat adalah surga dengan seribu keindahan". Thx buat semua keindahan yang telah kalian berikan..

11. *Friends of mine* : Bayek, Andi, Tino, Gilang, Putu, Amos, Rico, Tomo, Akin, Rio, Kentung, Ante, Wahyu, Danang & Dendra (kembar leboy), Odix, Mbah Wir, Arsyad, Hendrik, Putra, eCesc, Tubbies, Bulin, Dona, Kia, Eka, Babun, Kenthus, Frangko, Cepot, Angga, Sopex, Puput, Galuh, Gana, Ambur, Ega, Teti, Fitri, Bety, Sinta, Ariana, Ninda, Lina, Mayang, Tika, dll.
12. Keluarga besar KORFAH 2004-2008 dan Team sepak bola FH UNS.
13. Seluruh keluarga besar Angkatan 2004 dan pihak-pihak yang telah membantu terselesaikannya penulisan hukum ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya, sehingga tidak menjadi suatu karya yang sia-sia nantinya.

Surakarta, 2008

Penulis

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Persetujuan .....	ii
Pengesahan .....	iii
Motto .....	iv
Persembahan .....	v

Kata Pengantar .....	vi
Daftar Isi .....	vii
Abstrak .....	x

## BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan masalah .....	4
C. Rumusan Masalah .....	4
D. Tujuan Penelitian.....	4
E. Manfaat Penelitian .....	5
F. Metodologi Penelitian .....	6
G. Sistematika Penulisan Hukum.....	9

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori.....	11
1. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana.....	11
a. Pengertian Hukum Pidana.....	11
b. Sifat Hukum Pidana.....	13
c. Tujuan Hukum Pidana.....	14
2. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	16
a. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana.....	16
1. Istilah tindak Pidana.....	16
2. Pengertian Tindak Pidana.....	17
b. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	21
c. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	23
3. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penggelapan	27
a. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan.....	27
b. Jenis-jenis Tindak Pidana Penggelapan.....	28
4. Tinjauan Umum Tentang Kendaraan Bermotor.....	31
Pengertian Kendaraan Bermotor Roda Dua.....	31



B. Kerangka Pemikiran .....	32
-----------------------------	----

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian .....	33
Kasus Posisi .....	33
B. Pembahasan .....	48
1. Dasar pertimbangan Hakim dalam pemeriksaan perkara tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor.....	48
2. Hambatan-hambatan dalam pemeriksaan tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor.....	53

### BAB IV PENUTUP

A. Simpulan .....	55
B. Saran .....	56

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN-LAMPIRAN

### ABSTRAK

**INDRIAWAN, 2008, KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELOPAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA (Studi kasus di Pengadilan Negeri Sukoharjo).** Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penelitian ini mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam pemeriksaan perkara tindak pidana penggelapan serta untuk mengetahui hambatan dalam pemeriksaan perkara tindak pidana penggelapan yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo.

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Sukoharjo sebagai tempat penelitian dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif yang semata-mata

memaparkan kasus yang diteliti. Spesifikasi penelitian ini adalah yuridis normatif karena berpijak dari azas-azas hukum.

Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan Hakim dalam pemeriksaan perkara tindak pidana penggelapan di Pengadilan Negeri Sukoharjo adalah sebagai berikut : surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, respon atau tanggapan dari terdakwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum mengenai pokok perkara yang didakwakan, keterangan saksi-saksi di persidangan, barang bukti perkara yang dihadirkan dalam persidangan, kesinambungan, kesesuaian, dan hubungan antara fakta-fakta hukum yang terungkap di pengadilan, hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa selama pemeriksaan tindak pidana penggelapan, keterangan dari terdakwa mengenai kebenaran tindak pidana penggelapan yang dilakukannya. Sedangkan hambatan dalam pemeriksaan perkara tindak pidana penggelapan di Pengadilan Negeri Sukoharjo adalah sulitnya menghadirkan saksi yang mengetahui kejadian pelaku atau terdakwa dalam mendapatkan barangnya dan pembuktian barang ditangan pelaku atau terdakwa bukan karena kejahatan.

Rekomendasi dari penelitian ini adalah bagi Aparat penegak hukum terutama Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan agar lebih memperhatikan faktor pembuktian barang ditangan pelaku bukan karena kejahatan dan faktor kesengajaan dari pelaku dalam melakukan tindak pidana penggelapan. Bagi masyarakat yang mengetahui kejadian tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor dan mengetahui kejadian pelaku dalam mendapatkan barangnya hendaknya mau memberikan kesaksian dipersidangan.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Berkembangnya teknologi dan masuknya modernisasi membawa dampak yang cukup serius bagi moral masyarakat. Sadar atau tidak, kemajuan zaman telah mendorong terjadinya krisis moral. Krisis moral ini dipicu oleh ketidakmampuan untuk menyaring informasi dan budaya yang masuk sehingga sangat mungkin krisis moral ini akan memacu timbulnya kejahatan dalam masyarakat. Perlu disadari bahwa kejahatan dapat dilakukan oleh siapapun dan terhadap siapapun.

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju maka semakin meningkat pula kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat misalnya

pencurian, pembunuhan, perampokan, penipuan, penggelapan, perkosaan, penculikan dan sebagainya. Kejahatan merupakan fenomena kehidupan masyarakat, karena itu tidak dapat lepas dari ruang dan waktu. Naik turunnya kejahatan tergantung kepada keadaan masyarakat, keadaan politik, kebudayaan dan sebagainya.

Kejahatan sebagai fenomena sosial yang terjadi dimuka bumi mungkin tidak akan ada habis-habisnya. Mengenai masalah ini dapat dilihat dari pemberitaan media massa seperti surat kabar, majalah dan televisi yang selalu saja memuat berita tentang terjadinya kejahatan. Tampaknya masalah kejahatan ini akan selalu berkembang, baik itu dilihat dari segi kuantitas. Bahwa daerah perkotaan kejahatannya berkembang terus sejalan dengan berkembangnya kota selalu disertai dengan perkembangan kualitas dan kuantitas kejahatan atau kriminalitas, akibat perkembangan ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan pemerintahan.

Kejahatan tidak akan dapat hilang dengan sendirinya, sebaliknya kasus kejahatan semakin sering terjadi dan yang paling dominan adalah jenis kejahatan terhadap harta kekayaan, khususnya yang termasuk didalamnya adalah tindak pidana penggelapan. ” Bahwa kejahatan terhadap harta benda akan tampak meningkat di negara-negara sedang berkembang. Kenaikan ini sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi ” (Soerjono Soekanto, 1987 : 2 ). Disetiap negara tidak terkecuali negara yang paling maju sekalipun, pasti akan menghadapi masalah kejahatan yang mengancam dan mengganggu ketentraman dan kesejahteraan penduduknya. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan tidak hanya tumbuh subur di negara miskin dan berkembang, tetapi juga dinegara-negara yang sudah maju.

Negara Indonesia adalah negara yang termasuk dalam kategori negara berkembang dan tentunya tidak terlepas dari permasalahan yang telah yang dikemukakan di atas. Tindak kejahatan yang terjadi di negara-negara yang

berkembang masih relatif tinggi. Kenaikannya dibandingkan dengan tingkat kejahatan yang terjadi di negara-negara maju masih tampak wajar. Sebab tingkat kehidupan ekonomi dan sosial negara-negara maju sudah lebih baik dan tingkat kesadaran hukumnya juga lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara sedang berkembang. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila masalah kejahatan atau kriminalitas di Indonesia merupakan akibat dari kehidupan masyarakatnya.

Kejahatan dapat diartikan secara kriminologis dan yuridis. Kejahatan dalam arti kriminologis yaitu perbuatan manusia yang menodai norma-norma dasar dari masyarakat. Hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan unsur yang menyalahi aturan-aturan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Kejahatan yuridis yaitu perilaku jahat atau perbuatan jahat dalam arti hukum pidana maksudnya bahwa kejahatan itu dirumuskan di dalam peraturan-peraturan pidana. Salah satu contoh kejahatan yaitu tindak pidana penggelapan yang di atur dalam Pasal 372 sampai dengan Pasal 377 KUHP.

Kendaraan bermotor merupakan sarana transportasi vital yang merupakan barang berharga yang semakin banyak pemiliknya maupun yang ingin memilikinya. Semakin banyak kendaraan bermotor tentu membawa konsekuensi yang semakin besar akan tantangan penggelapan terhadap kendaraan bermotor itu sendiri. Kejahatan penggelapan kendaraan bermotor dipengaruhi adanya peluang dan kemudahan karena hanya berdasarkan rasa percaya, misalnya seseorang meminjam kendaraan bermotor milik temannya dengan alasan tertentu sehingga sang pemilik tanpa ada rasa curiga meminjamkan kendaraan bermotor dimilikinya kepada temannya tersebut tapi ternyata teman yang dipinjami tersebut tidak mengembalikan kendaraan bermotor itu tapi malah digadaikan atau seseorang yang meminjam kendaraan bermotor disewakan dengan jaminan sejumlah uang sewa dan KTP tapi kemudian sang peminjam tersebut tidak mengembalikan kendaraan bermotor itu sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dan kendaraan

bermotor itu digadaikan kepada orang lain. Adapun alasan orang yang menggelapkan kendaraan bermotor yaitu karena ingin memiliki kendaraan bermotor tersebut dan karena orang tersebut memerlukan uang untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya ( alasan ekonomi ). Sedangkan orang yang mau menerima kendaraan bermotor yang digelapkan seseorang karena orang tersebut tidak mengetahui kalau kendaraan bermotor tersebut bukan milik orang yang menggadai karena orang yang menggadai menyerahkan STNKnya.

Pada saat ini sering terjadi kasus tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor. Hasil dari penggelapan tersebut kemungkinan langsung di jual kepada orang lain atau digadaikan kepada orang lain. Peran pengadilan sangat berpengaruh terhadap banyak sedikitnya tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor, misalnya dalam penjatuhan hukuman bagi seorang pelaku penggelapan masih sangat ringan di bandingkan dengan ancaman hukuman di dalam KUHP.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis untuk mengkaji masalah tersebut dengan mengambil judul :

**"KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA" (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sukoharjo).**

## **B. PEMBATASAN MASALAH**

Penulis membatasi masalah yang merupakan obyek dari permasalahan dengan maksud agar penelitian ini jelas, terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang ada mengingat keterbatasan waktu, biaya dan pengetahuan, maka agar tidak terjadi penyimpangan dari pokok permasalahan, penelitian ini membatasi masalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini hanya meneliti dan mengkaji putusan tindak pidana penggelapan di Pengadilan negeri Sukoharjo.

2. Penelitian ini membatasi pada kasus-kasus yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tentang tindak pidana penggelapan di pengadilan Negeri Sukoharjo.

### **C. PERUMUSAN MASALAH**

Agar permasalahan yang akan di teliti dapat dipecahkan, maka perlu di susun dan dirumuskan suatu permasalahan yang jelas dan sistematis. Perumusan masalah ini dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi penulis dalam membatasi permasalahan yang akan ditelitinya sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang jelas serta sesuai dengan yang diinginkan. Berdasarkan uraian latar belakang yang ada, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam pemeriksaan perkara tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor di Pengadilan Negeri Sukoharjo ?
2. Apa yang menjadi hambatan-hambatan dalam pemeriksaan perkara tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor di Pengadilan Negeri Sukoharjo ?

### **D. TUJUAN PENELITIAN**

Suatu penelitian terhadap obyek yang diteliti agar tidak sia-sia dan tidak dilakukan seenaknya maka harus mempunyai tujuan yang jelas. Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan solusi yang terbaik dari masalah praktis serta disebutkan pada rumusan masalah diatas. Berdasarkan hal tersebut maka penulisan hukum ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif
  - a. Mengetahui dasar pertimbangan Hakim di dalam pemeriksaan perkara tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor di Pengadilan Negeri Sukoharjo.

- b. Mengetahui hambatan-hambatan dalam pemeriksaan perkara tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor di Pengadilan Negeri Sukoharjo.

## 2. Tujuan Subyektif

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam menghadapi permasalahan yang sama bagi aparat penegak hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo.
- b. Sebagai syarat akademis untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

## **E. MANFAAT PENELITIAN**

Penelitian selain mempunyai tujuan yang jelas juga diharapkan memberikan manfaat. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian adalah :

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Pidana pada khususnya.
- b. Dapat dipergunakan sebagai bahan bacaan ( literatur ) di samping literatur-literatur yang sudah ada tentang tindak pidana penggelapan khususnya mengenai penanganan tindak pidana penggelapan.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Penulisan hukum ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terkait dalam masalah yang diteliti dan berguna dalam menyelesaikannya.
- b. Untuk melatih mengembangkan pola pikir yang sistematis sekaligus untuk mengukur kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang sudah diperoleh.

- c. Sebagai pewacanaan keadaan hukum khususnya di bidang tindak pidana penggelapan.

## **F. METODE PENELITIAN**

Suatu penelitian ilmiah dapat dipercaya kebenarannya apabila disusun dengan menggunakan metode yang tepat. Metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman-pedoman, cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi (Soerjono Soekanto, 1986 : 6).

Penelitian ini memerlukan sejumlah data agar dalam analisis dihasilkan suatu hasil penelitian yang valid. Adapun metode yang digunakan meliputi hal berikut ini :

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam menyusun skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma. Atau dengan kata lain penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian. Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap azas-azas hukum yaitu dilakukan dengan cara memilih pasal-pasal yang mengatur masalah tindak pidana penggelapan kemudian mengkaitkannya dengan putusan pengadilan.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian hukum ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.

### **3. Lokasi Penelitian**



Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di wilayah Sukoharjo dengan obyek penelitian salah satu Pengadilan Negeri yang ada di Sukoharjo yaitu Pengadilan Negeri Sukoharjo. Alasan pemilihan lokasi tersebut birokrasinya tidak terlalu berbelit dan para pihak yang terkait memberi kemudahan kepada penulis dalam memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan.

#### 4. Jenis Data

Data-data yang diperoleh yang akan digunakan penulis dalam penelitian sebagai berikut :

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari lapangan, yang berupa sejumlah keterangan yang diperoleh dari dokumen, berkas perkara, buku literatur, majalah, arsip, buku hasil penelitian terdahulu serta peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

#### 5. Sumber Data

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Putusan dari Pengadilan Negeri Sukoharjo yang meliputi hal-hal yang berkaitan dengan penanganan masalah tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor.

##### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder sebagai pendukung dari data yang akan digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui pencatatan maupun dokumentasi kajian-kajian, hasil penelitian dan buku-buku referensi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

##### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier dari penelitian ini adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Sehubungan dengan jenis penelitian yang merupakan penelitian normatif maka untuk memperoleh data yang mendukung, kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan (dokumentasi) data-data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan untuk mengumpulkan dan menyusun data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dan juga dilakukan wawancara untuk memperkuat hasil penelitian dan pembahasan.

## 7. Teknik Analisis Data

Faktor terpenting dalam penelitian untuk menentukan kualitas hasil penelitian yaitu dengan analisis data. Data yang telah kita peroleh setelah melewati mekanisme pengolahan data, kemudian ditentukan jenis analisisnya, agar nantinya data yang terkumpul tersebut lebih dapat dipertanggungjawabkan.

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti dan dapat dirumuskan hipotesis kerja, yang dalam hal ini analisis dilakukan secara logis, sistematis dan yuridis normatif dalam kaitannya dengan masalah yang diteliti. Adapun yang dimaksud dengan logis adalah pemahaman data dengan menggunakan prinsip logika baik itu deduktif maupun induktif, sistematis adalah dalam pemahaman suatu data yang ada tidak secara berdiri sendiri namun dalam hal ini harus saling terkait, dan yang dimaksud dengan yuridis normatif adalah memahami data dari segi aspek hukum dengan menggunakan interpretasi yang ada, asas-asas yang ada, perbandingan hukumnya, sinkronisasinya dan juga interpretasi dari teori hukum yang ada (Bambang Waluyo, 2002 : 77).

## **G. SISTEMATIKA PENULISAN HUKUM**

Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai bahasan dalam penulisan hukum ini, penulis akan membagi penulisan hukum atau skripsi ini menjadi empat bab dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub bab yang disesuaikan dengan luas pembahasannya. Adapun sistematika dari penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan metode penelitian.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai kerangka teori dan kerangka pemikiran. Dalam kerangka teori diuraikan mengenai tinjauan umum tentang hukum pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana penggelapan dan tinjauan umum tentang kendaraan bermotor roda dua.

#### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan tentang dasar pertimbangan Hakim dalam pemeriksaan perkara tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor di Pengadilan Negeri Sukoharjo. Serta hambatan-hambatan dalam pemeriksaan perkara tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua di Pengadilan Negeri Sukoharjo.

#### **BAB IV : PENUTUP**

Dalam bab ini memuat mengenai simpulan dan saran yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kerangka Teori**

##### **1. Tinjauan umum tentang Hukum Pidana**

###### **a. Pengertian Hukum Pidana**

Salah satu fenomena yang meresahkan dalam kehidupan bermasyarakat adalah terjadinya berbagai tindak kejahatan atau kriminalitas. Kejahatan merupakan kenyataan sosial yang terus berkembang dengan berbagai macam jenis dan berbagai modus operandinya, serta selalu membawa kerugian bahkan membahayakan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, suatu tindak kejahatan harus dihilangkan. Salah satu sarana untuk memberantas tindak kejahatan adalah dengan adanya hukum pidana.

Secara bahasa istilah hukum pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda "*strafrecht*". Tidak ada batasan baku mengenai definisi hukum pidana ini. Lamintang mengatakan bahwa kata-kata hukum pidana merupakan kata-kata yang mempunyai lebih daripada satu pengertian, sehingga pengertian hukum pidana dari beberapa ahli memiliki perbedaan (P.A.F. Lamintang, 1997 : 1).

Soesilo mengemukakan bahwa hukum pidana yaitu kumpulan-kumpulan dari seluruh peristiwa-peristiwa pidana atau perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-Undang, yang apabila dilakukan atau dialpakan, maka orang yang melakukan atau mengalpakannya itu diancam dengan hukuman (R.Soesilo, 1984 : 4). Menurut Moeljatno (2002 : 1) memberikan suatu pengertian bahwa hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk :

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan tersebut mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut ;
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan ;
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar tersebut.

Menurut profesor Simons hukum pidana itu dibagi menjadi hukum pidana dalam arti obyektif ( *hukum positif / ius poenale* ) dan hukum pidana dalam arti subyektif ( *ius puniendi* ). "Hukum pidana dalam arti obyektif adalah keseluruhan dari larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang atas pelanggaran-pelanggarannya oleh negara atau oleh suatu masyarakat hukum lainnya telah dikaitkan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa suatu hukuman dan keseluruhan dari peraturan-peraturan dimana syarat-syarat mengenai akibat hukum itu telah diatur serta keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mengatur masalah penjatuan dan pelaksanaan dari hukumannya itu sendiri sedangkan hukum pidana dalam arti subyektif mempunyai dua arti yaitu :

- 1) Hak dari negara dan alat-alat kekuasaannya untuk menghukum, yakni hak yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti obyektif ;
- 2) Hak dari negara untuk mengkaitkan pelanggaran terhadap peraturan peraturannya dengan hukuman (P.A.F.Lamintang, 1997 : 3-4)".

Definisi lain hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata "pidana" berarti "hal yang dapat dipidana", yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal

yang tidak enak dirasakan dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkannya (Wirjono Projodikoro, 1986 : 1).

b. Sifat Hukum Pidana

Ditinjau dari sifatnya hukum pidana merupakan hukum publik yaitu mengatur hubungan antara individu dengan suatu masyarakat hukum umum, yakni negara atau daerah-daerah di dalam negara. Sifatnya sebagai hukum publik nampak jelas dari kenyataan-kenyataan yaitu :

- 1) Sifatnya yang dapat dihukum dari seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana itu tetap ada, walaupun tindakannya itu telah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari korbannya, dan
- 2) Penuntutan menurut hukum pidana itu tidak digantungkan pada keinginan dari orang yang telah dirugikan oleh suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh orang lain ( P.A.F.Lamintang, 1997 : 14 ).

Sifat hukum pidana sebagai hukum publik tidak serta merta melekat begitu saja. Dahulu, hukum pidana lebih bersifat privat (sipil) karena apabila seseorang melakukan kejahatan terhadap orang lain, maka orang atau keluarga ataupun suku bangsa orang yang menjadi korban ini diperkenankan membalas dendam kepada orang yang telah merugikannya itu. Prinsip yang dipakai adalah "darah dibalas dengan darah", sehingga tidak dapat dielakkan bahwa pada saat itu banyak terjadi pembunuhan besar-besaran diantara suku bangsa yang satu dengan yang lain. Belum adanya organisasi kenegaraan seperti yang dikenal sekarang adalah penyebab hal-hal tersebut sering terjadi.

Lambat laun oleh karena diketahui bahwa hal-hal tersebut sangat merugikan suku-suku bangsa itu sendiri, maka seiring dengan perkembangan terbentuknya organisasi masyarakat berupa negara, kepentingan-kepentingan yang dianggap sebagai kepentingan bersama harus pula diatur oleh negara. Sehingga apabila terjadi pelanggaran

terhadap kepentingan perorangan yang merugikan kepentingan individu itu sendiri, maka pelanggaran tersebut juga merupakan pelanggaran yang merugikan kepentingan masyarakat, dan hanya negaralah yang diberi kekuasaan untuk menuntut dan menjatuhkan hukuman kepada orang-orang yang telah berbuat pelanggaran-pelanggaran itu. Demikian maka hukum pidana yang tadinya bersifat privat (sipil) sekarang menjadi umum dan menjadi hukum publik (R.Soesilo, 1984 ; 3-4).

c. Tujuan Hukum Pidana

Pada dasarnya semua hukum bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan dalam pergaulan hidup bermasyarakat, baik dalam lingkungan yang kecil maupun lingkungan yang lebih besar, agar didalamnya terdapat keserasian, suatu ketertiban, suatu kepastian hukum dan lain sebagainya. Adapun dengan hukum pidana yang merupakan salah satu bagian dari hukum pada umumnya, yaitu bahwa semua hukum tersebut memuat sejumlah ketentuan-ketentuan. Ketentuan-ketentuan tersebut dibuat untuk menjamin agar norma-norma yang diakui dalam hukum itu benar-benar ditaati orang, akan tetapi di dalam satu hal hukum pidana itu menunjukkan adanya suatu perbedaan dari hukum-hukum yang lain pada umumnya, yaitu bahwa didalamnya orang-orang mengenal adanya suatu kesengajaan untuk memberikan suatu akibat hukum berupa suatu *bijzondere leed* atau suatu penderitaan yang bersifat khusus dalam bentuk suatu hukuman pada mereka yang telah melakukan suatu pelanggaran terhadap keharusan-keharusan atau larangan-larangan yang telah ditentukan didalamnya (P.A.F.Lamintang,1997 :16).

Adanya suatu penderitaan yang bersifat khusus dalam bentuk hukuman itu sudah pasti ada di dalam bagian-bagian yang lain dari hukum pada umumnya, yaitu agar norma-norma yang terdapat didalamnya benar-benar ditaati. Namun, penderitaan yang bersifat khusus didalam hukum



pidana sifatnya sangat berbeda dengan hukum-hukum lain tersebut, karena didalam hukum pidana orang mengenal adanya perampasan kemerdekaan atau pembatasan kemerdekaan yang dapat dikenakan oleh hakim terhadap orang-orang yang telah melanggar norma-norma yang telah diatur dalam hukum pidana. Orang juga mengenal perampasan nyawa dalam bentuk hukuman mati, yang secara nyata tidak dikenal dalam hukum-hukum lain pada umumnya.

Penderitaan-penderitaan yang bersifat khusus dalam bentuk hukuman-hukuman seperti yang telah dikatakan diatas, telah menyebabkan hukum pidana mendapat suatu tempat yang tersendiri diantara hukum-hukum yang lain. Menurut pendapat dari para ahli, hukum pidana itu hendaknya dipandang sebagai suatu *ultimum remedium* atau sebagai suatu upaya yang harus dipergunakan sebagai upaya yang harus dipergunakan sebagai upaya terakhir untuk memperbaiki kelakuan manusia dan wajarlah apabila orang menghendaki agar hukum pidana itu didalam penerapannya haruslah disertai dengan pembatasan-pembatasan yang seketat mungkin. Lebih lanjut dikatakan bahwa pada umumnya didalam membuat uraian tentang tujuan hukum pidana, sebagian ahli tidak mengadakan pemisahan antara tujuan hukum pidana itu sendiri dengan tujuan diadakannya hukuman atau pidana.

Menurut ahli-ahli filsafat dari Jerman pada akhir abad ke-18 bahwa tujuan dibentuknya hukuman adalah mutlak untuk menghukum atau membalas perbuatan jahat seseorang. Orang yang jahat harus diberi hukuman dan hukuman yang adil adalah hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Demikian tujuan hukum pidana adalah pembalasan.

Berbeda dengan apa yang dikemukakan Franz von Litz, van Hamel dan Simons yang mengatakan bahwa tujuan hukum pidana atau hukuman

adalah bukan sebagai pembalasan, tetapi lebih melihat pada tujuan hukuman, dimana :

- 1) menghindari masyarakat dari perbuatan yang jahat
- 2) berkaitan dengan pelaksanaan hukuman yang dilakukan ditempat umum dimaksudkan agar masyarakat umum mengetahui proses penjatuhan hukuman terhadap suatu perbuatan jahat sehingga jika masyarakat mengetahui kejamnya hukuman itu diharapkan perbuatan jahat itu tidak akan terulang lagi atau dilakukan oleh orang lain lagi (menakut-nakuti serta memperbaiki).
- 3) membinasakan orang yang melakukan kejahatan dari pergaulan masyarakat; dan
- 4) mencapai ketertiban umum ( P.A.F. Lamintang,1997 : 17 ).

Kemudian, seiring dengan perkembangan pola pikir masyarakat timbul pendapat bahwa tujuan hukuman sebagai pembalasan sama sekali tidak memberi kepuasan hukum bagi kepentingan masyarakat. Begitu pula apabila tujuan hukum itu hanya untuk menakut-nakuti umum dan membinasakan penjahat, juga tidak memberikan suatu kepuasan hukum bagi masyarakat. Sehingga kedua tujuan hukuman tersebut haruslah berjalan beriringan, yaitu :

- 1) mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat; dan
- 2) mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana (P.A.F. Lamintang,1997 : 18).

## **2. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana**

### **a. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana**

### 1). Istilah Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *Strafbaarfeit* atau *delict* yang berasal dari bahasa Latin *delictum*. Sedangkan perkataan "*feit*" itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti "sebagian dari kenyataan" atau "*een gedeelte van werkelijkheid*" sedangkan "*strafbaar*" berarti "dapat dihukum" , sehingga secara harfiah perkataan "*strafbaar feit* " itu dapat diterjemahkan sebagai " sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum" (P.A.F. Lamintang, 1997 : 181).

### 2). Pengertian Tindak Pidana

Pengertian mengenai tindak pidana sangat banyak yang dirumuskan oleh para ahli hukum yang semuanya berbeda-beda, ada dua paham yang berbeda-beda dalam menerjemahkan tentang tindak pidana, yaitu paham monistis dan paham dualistis.

Beberapa pengertian tindak pidana menurut para ahli hukum yang menganut paham dualistis, yaitu diantaranya :

#### (a). Hazewinkel-Suringa

Mereka telah membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari *strafbaarfeit* sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya (P.A.F. Lamintang 1997 : 181).

#### (b). Pompe

Menurut Pompe perkataan *strafbaar feit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum (P.A.F. Lamintang, 1997 : 182).

#### (c). Van Hamel

Van Hamel merumuskan *strafbaar feit* sebagai kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan (Andi Hamzah, 1994 : 88).

(d). Karni

Karni mengatakan delik itu mengandung perbuatan yang mengandung perlawanan hak, yang dilakukan dengan salah dosa, oleh orang yang sempurna akal budinya dan kepada siapa perbuatan dipertanggungjawabkan (Sudarto, 1990 : 42).

(e). Moeljatno

Moeljatno memberikan arti perbuatan pidana sebagai suatu perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa yang melanggar larangan tersebut (Moeljatno, 2002 : 54).

(f). Vos

Vos merumuskan bahwa srafbaar feit adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan (Adami Chazawi, 2002 : 72).

Dari pendapat para ahli hukum tersebut diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Perbuatan manusia
- b) Melanggar aturan hukum
- c) Bersifat melawan hukum
- d) Dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.
- e) Kesalahan

Sedangkan beberapa pengertian mengenai tindak pidana menurut para ahli hukum yang menganut paham monistis, yaitu diantaranya :

(1). Simon

Simon merumuskan *strafbaar feit* sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum (P.A.F. Lamintang 1997 : 185)

(2). Wirjono Prodjodikoro

Beliau mengemukakan definisi tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana (Soemitro, 1996 : 29).

(3). J.E Jonkers

merumuskan tindak pidana adalah perbuatan yang melawan hukum yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

(4). H.J Van Schravendijk

merumuskan perbuatan yang boleh dihukum adalah kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh orang yang karena itu dapat dipersalahkan.

Para sarjana hukum yang tergolong dalam aliran monistis mengemukakan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Menurut Simon bahwa "*strafbaar feit*" adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab (Moeljatno, 2002 : 56).

Unsur-unsur "*strafbaar feit*" adalah :

- 1) Perbuatan manusia dan korporasi (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
- 2) Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*)
- 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*)

- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*)
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Menurut Van Hamel merumuskan "*strafbaar feit*" adalah kelakuan orang (*menselijkegedraging*) yang dirumuskan dalam "*wet*" yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan (Andi Hamzah, 1994 : 41).

Unsur-unsur "*strafbaar feit*" adalah :

- 1) Perbuatan tersebut dilakukan oleh manusia atau korporasi.
- 2) Dengan melawan hukum.
- 3) Patut dipidana
- 4) Dilakukan dengan kesalahan

Sedangkan menurut para sarjana hukum yang tergolong aliran dualistis mengemukakan sebagai berikut:

Pompe mengemukakan dalam hukum positif sifat hukum dan kesalahan (*schuld*) bukan merupakan sifat mutlak untuk adanya tindak pidana (*strafbaar feit*). Untuk adanya penjatuhan pidana tidak cukup dengan hanya adanya tindak pidana saja akan tetapi harus ada orang yang dapat dipidana (Bambang Poernomo, 1985 : 173).

Moeljatno menyebutkan bahwa unsur-unsur tindak pidana ada lima yaitu :

- 1). Kelakuan dan akibat (= perbuatan)
- 2). Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- 3). Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- 4). Unsur yang melawan hukum yang obyektif
- 5). Unsur melawan hukum yang subyektif (Moeljatno, 2002 : 63).

Kemudian disederhanakan lagi oleh Sudarto menjadi tiga, yaitu :

- 1) Perbuatan
- 2) Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil)

3) Bersifat melawan hukum (syarat materiil) ( Sudarto,1990 : 50).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa aliran monistis memandang suatu tindak pidana meliputi perbuatan yaitu orang dan korporasi, akibat dan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan dari si pelaku. Sedangkan aliran dualistis memandang bahwa dalam syarat-syarat pemidanaan terdapat pemisahan antara perbuatan dan akibat, dengan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan.

Meskipun aliran monistis dan dualistis mempunyai pandangan yang berbeda tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana, tetapi di dalam prakteknya untuk menentukan apakah pelaku tindak pidana tersebut dapat dipidana atau tidak kelima unsur tindak pidana tersebut tetap harus dibuktikan.

b. Unsur-unsur Tindak Pidana

Mengenai yang dimaksud dengan unsur-unsur tindak pidana itu sendiri terdapat perbedaan di antara para pakar, tetapi sebenarnya hal ini tidak begitu penting sebab persoalannya hanya mengenai perbedaan konstruksi yuridis dan tidak mengenai perbedaan dalam penjatuhan pidana. Dengan kata lain persoalannya adalah menyangkut teknik perundang-undangan.

Unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur subyektif dan unsur obyektif. Menurut Soemitro unsur subyektif tindak pidana adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku tinjau dari segi batinnya yaitu :

- 1) Kesengajaan ( *dolus* ) atau kealpaan ( *culpa* ) ;
- 2) Niat atau maksud dengan sengaja bentuknya ;
- 3) Ada atau tidaknya perencanaan untuk melakukan perbuatan tersebut ;
- 4) Adanya perasaan takut ( Soemitro, 1996 : 34 ).

Selain itu, beliau juga mendefinisikan unsur obyektif adalah hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah ketika tindak pidana itu dilakukan dan berada di luar batin si pelaku, yaitu :

- 1) Sifat melawan hukum dari perbuatan itu ;
- 2) Kualitas atau kedudukan si pelaku, misalnya sebagai ibu, pegawai negeri sipil dan hakim ;
- 3) Kausalitas yaitu berhubungan dengan sebab akibat yang terdapat di dalamnya (Soemitro, 1996 : 36 ).

Unsur-unsur tindak pidana menurut R. Soesilo adalah sebagai berikut :

- 1) Unsur obyektif yaitu :
  - a) Perbuatan manusia yaitu perbuatan positif, atau perbuatan negatif yang menyebabkan pelanggaran pidana ;
  - b) Akibat perbuatan manusia yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum pidana itu perlu supaya dapat dipidana ;
  - c) Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidana jika perbuatan itu melawan hukum dan melawan undang-undang
  - d) Kausalitas yaitu tiap-tiap peristiwa yang terjadi itu tentu ada sebabnya. Peristiwa yang satu adalah akibat peristiwa yang lain atau suatu peristiwa menimbulkan satu atau beberapa peristiwa yang lain.
- 2) Unsur-unsur subyektif meliputi :

Kesalahan yaitu kesalahan dari orang yang melanggar norma pidana artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pelanggar ( R.Soesilo, 1984 : 26 ).



Selain itu Hazewinkel-Suringa melihat unsur-unsur itu dari segi yang lain. Ia mengemukakan unsur-unsur tindak pidana yang diambil dari rumusan undang-undang yaitu :

- a) Dalam setiap delik terdapat unsur tindakan/perbuatan seseorang;
- b) Dalam beberapa delik disebutkan apa yang disebut sebagai akibat konstitutif ( misalnya hilangnya nyawa orang ) ;
- c) Banyak delik-delik yang memuat unsur-unsur psikis ( misalnya adanya kesengajaan atau kealpaan ) ;
- d) Adanya beberapa delik yang mengandung keadaan obyektif (misalnya di muka umum) ;
- e) Dalam beberapa delik terdapat faktor subyektif psikis (misalnya dengan direncanakan) dan obyektif non *psikis* (misalnya kedudukan sebagai bapak, pegawai negeri sipil, hakim dan sebagainya).
- f) Beberapa delik mengandung syarat tambahan untuk dapat dipidana ( misalnya jika betul-betul terjadi perang ) (Soemitro, 1996 : 37 ).

Orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya hanya orang yang dapat dipersalahkan. Tentang pengertian kesalahan ini dapat kita jumpai dalam Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dirumuskan bahwa ” Tiada seorang juapun dapat dipidana, kecuali oleh pengadilan, karena alat bukti yang menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atau perbuatan yang dituduhkan atas dirinya”.

c. Jenis-jenis tindak pidana

Pembagian tindak pidana dibedakan berdasarkan kriteria dan tolak ukur tertentu, karena di dalam peraturan perundang-undangan perumusan

tindak pidana sangat beragam. Tindak pidana dapat digolongkan antara lain sebagai berikut :

1) Tindak Pidana Kejahatan dan Tindak Pidana Pelanggaran

Penggolongan tindak pidana di dalam KUHP terdiri atas kejahatan (*rechterdelicte*) dan pelanggaran (*wetsdelicten*). Kejahatan diatur di dalam Buku II KUHP dan pelanggaran diatur di dalam Buku III KUHP. Kejahatan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan keadilan dan di ancam pidana lebih berat daripada pelanggaran. Pelanggaran merupakan perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang-undang menyebutkan sebagai delik, dan diancam pidana lebih ringan daripada kejahatan.

2) Tindak Pidana Formal dan Tindak Pidana Materiel

Penggolongan tindak pidana ini berdasarkan bentuk perumusannya di dalam undang-undang. Tindak pidana formal merupakan tindak pidana yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang, dan bukan pada akibat dari perbuatan itu, sehingga akibat dari tindak pidana tersebut bukan merupakan unsur dari tindak pidananya. Tindak pidana materiel merupakan tindak pidana yang perumusannya menitikberatkan pada akibat dari perbuatan itu.

3) Tindak Pidana Aduan dan Tindak Pidana Bukan Aduan

Penggolongan tindak pidana ini berdasarkan pada kriteria sumber prakarsa atau inisiatif penuntutannya. Tindak pidana aduan merupakan tindak pidana yang penuntutannya berdasarkan pada adanya pengaduan dari pihak korban tindak pidana. Sedangkan tindak pidana bukan aduan merupakan tindak pidana yang penuntutannya tidak didasarkan pada prakarsa atau inisiatif dari korban.

4) Tindak Pidana dengan Kesengajaan dan Tindak Pidana dengan Kealpaan

Penggolongan tindak pidana ini berdasarkan pada unsur-unsur tindak pidana yang ada dan bentuk kesalahannya. Tindak pidana dengan kesengajaan merupakan tindak pidana yang terjadi karena pelaku memang menghendaki untuk melakukan tindak pidana tersebut, termasuk juga mengetahui timbulnya akibat dari perbuatan itu, misalnya : pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP). Tindak pidana dengan kealpaan merupakan tindak pidana yang terjadi sementara sebenarnya pelaku tidak berkeinginan untuk melakukan perbuatan itu, demikian pula dengan akibat yang ditimbulkannya atau tidak adanya peduga-dugaan yang diharuskan oleh hukum dan penghati-hatian oleh hukum, misalnya : karena kealpaannya menyebabkan matinya seseorang (Pasal 359 KUH).

5) Tindak Pidana Sederhana dan Tindak Pidana yang Ada Pemberatannya

Tindak pidana sederhana merupakan tindak pidana dalam bentuk pokok tetapi tidak ada keadaan yang memberatkan, misalnya : penganiayaan ( Pasal 351 KUHP ). Tindak pidana yang ada pemberatannya merupakan tindak pidana dalam bentuk pokok tetapi ada keadaan yang memberatkan, misalnya ; pencurian pada waktu malam hari ( Pasal 363 KUHP )

6) Delik yang Berlangsung Terus dan Delik yang Tidak Berlangsung Terus

Delik yang berlangsung terus merupakan tindak pidana yang terjadinya tidak mensyaratkan keadaan terlarang yang berlangsung lama. Delik yang berlangsung terus merupakan tindak pidana yang

berciri, bahwa keadaan terlarang itu berlangsung lama, misalnya : merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP).

7) Delik Tunggal dan Delik Berganda

Delik tunggal merupakan tindak pidana yang terjadi cukup dengan satu kali perbuatan saja. Delik berganda merupakan suatu tindak pidana yang baru dianggap terjadi bila dilakukan berkali-kali, misalnya : penadahan sebagai suatu kebiasaan ( Pasal 481 KUHP ).

8) Tindak Pidana *Commissionis*, Tindak Pidana *Omissionis* dan Tindak Pidana *Commissionis Per Omissionem Commissa*

Penggolongan tindak pidana ini didasarkan pada kriteria bentukdari perbuatan yang menjadi elemen dasarnya. Tindak pidana *commissionis* merupakan tindak pidana yang berupa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh suatu perundang-undangan atau melanggar larangan, misalnya : penipuan ( Pasal 378 KUHP ). Tindak pidana *ommissionis* merupakan tindak pidana pasif atau negatif, ditandai dengan tidak dilakukannya perbuatan yang diperintahkan atau diwajibkan oleh perundang-undangan, misalnya : tidak menolong orang yang berada dalam keadaan bahaya ( Pasal 531 KUHP ). Tindak pidana *commissionisper omissionem commissa* merupakan tindak pidana *commissionis* tetapi dilakukan dengan jalan tidak berbuat atau tidak melakukan sesuatu yang merupakan kewajibannya, misalnya seorang ibu tidak menyusui anaknya dan membiarkan anaknya kehausan dan kelaparan hingga meninggal ( Pasal 338 dan Pasal 340 KUHP ).

9) Tindak Pidana Ringan dan Tindak Pidana Berat

Penggolongan tindak pidana ini berdasarkan kriteria yang bersifat kuantitatif ataupun kriminologis. Tindak pidana ringan merupakan tindak pidana yang dampak kerugiannya tidak besar

sehingga ancaman pidananya juga ringan. Tindak pidana berat merupakan tindak pidana yang dampak kerugian yang ditimbulkannya sangat besar sehingga ancaman pidananya berat.

#### 10) Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus

Tindak pidana umum merupakan tindak pidana yang perumusannya sudah terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tindak pidana khusus merupakan tindak pidana yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang, misalnya : tindak pidana korupsi.

### 3. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penggelapan

#### a. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan

Istilah penggelapan sebagaimana yang lazim dipergunakan orang untuk menyebut jenis kejahatan yang di dalam buku II Bab XXIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu adalah suatu terjemahan dari perkataan "*verduistering*" dalam bahasa Belanda. Delik yang berkualifikasi atau yang bernama penggelapan ini diatur dalam Pasal 372. Banyak unsur-unsur yang menyeruapi delik pencurian, hanya saja beradanya barang yang dimaksud untuk dimiliki ( *zich toeegenen* ) itu di tangan pelaku penggelapan bukanlah karena seperti halnya pencurian. Pengertian pemilikan juga seperti di dalam pencurian.

Perbedaan antara pencurian dan penggelapan terletak pada siapa yang secara nyata menguasai barangnya. Pencurian tidaklah mungkin terhadap suatu barang yang sudah berada dalam kekuasaan hukum dan kekuasaan nyata pelaku. Pengambilan barang secara melawan hukum dengan persetujuan si pemegang adalah pencurian. "Barang yang ada dalam kekuasaannya" adalah barang yang dikuasai oleh pelaku, tidak

perduli apakah dikuasai olehnya sendiri atau oleh orang lain, termasuk juga barang yang dipercayakan olehnya kepada orang lain yang menyimpan barang itu untuknya. "Menguasai barang" berarti bahwa pelaku berada dalam hubungan langsung dan nyata dengan barang itu.

Beradanya barang ditangan pelaku yang bukan karena kejahatan itu misalnya semula pelaku dititipi untuk diangkut, dijualkan atau disimpan tetapi kemudian si pelaku mempunyai maksud yang berbeda daripada maksud keberadaan barang itu ditangannya, melainkan menjadi dengan maksud secara melawan hukum untuk bertindak sebagai pemilik. Penggelapan juga mempunyai pemberatan (berkualifikasi) jika ada hubungan kerja tertentu, ada masalah upah, dan penggelapan ringan jika nilai obyeknya maksimal Rp. 250,- kecuali itu seperti halnya pencurian terdapat juga penggelapan dalam keluarga.

b. Jenis-jenis Tindak Pidana Penggelapan

Tindak pidana penggelapan diatur dalam Buku II Bab XXIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berjudul " Penggelapan ". Tindak pidana penggelapan diatur dalam beberapa pasal yaitu Pasal 372 KUHP sampai dengan Pasal 377 KUHP yang isinya :

1) Pasal 372

"Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan hanya ada padanya bukan karena kejahatan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya 15 kali enam puluh rupiah".

2) Pasal 373

"Perbuatan yang diterangkan pada Pasal 372, bilamana yang digelapkan itu bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah, dihukum sebagai penggelapan ringan, dengan

hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya 15 kali enam puluh rupiah”.

3) Pasal 374

”Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun”.

4) Pasal 375

”Penggelapan yang dilakukan orang kepadanya terpaksa diberikan untuk disimpan, atau oleh wali, pengampu, pengurus, orang yang menjalankan wasiat, pengurus lembaga derma atau yayasan terhadap barang yang ada pada mereka karena jabatan mereka tersebut itu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun”.

5) Pasal 376

”Aturan pada Pasal 376 berlaku bagi kejahatan diterangkan dalam bab ini”.

6) Pasal 377

a) ”Pada waktu pemidanaan karena salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 372, Pasal 274, Pasal 375, bahwa Hakim dapat memerintahkan supaya putusan diumumkan dan dicabutnya hak-hak tersebut dalam Pasal 35 KUHP yaitu :

(1) Menjabat segala jabatan atau jabatan yang ditentukan

(2) Masuk militer

(3) Memilih dan boleh dipilih dalam pemilihan yang dilakukan karena Undang-Undang Umum

(4) Menjadi penasehat atau wali atau wali pengawas atau pengampu atau pengampu pengawas atau orang alian atau pada anaknya sendiri

(5) Kekuasaan bapak, perwalian dan pengampuan atau anaknya sendiri

(6) Melakukan pekerjaan yang ditentukan.

b) "Jika yang bersalah melakukan kejahatan dalam pekerjaannya, boleh dicabut haknya melakukan pekerjaan itu".

Berdasarkan dari sekian banyak Pasal tersebut diatas, maka tindak pidana penggelapan dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu :

1) Penggelapan dalam bentuk pokok

Kejahatan penggelapan dalam bentuk pokok dalam Pasal 372 KUHP yaitu kejahatan yang dilakukan seseorang yang dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu benda yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain. Akan tetapi orang tersebut dalam mendapatkan barang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

2) Penggelapan ringan

Maksud dari penggelapan ringan adalah seperti diterangkan dalam Pasal 373 KUHP yaitu suatu kejahatan penggelapan yang dilakukan oleh seseorang yang mana jika penggelapan tidak terhadap ternak ataupun nilainya tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah. Mengapa disebutkan bahwa yang digelapkan itu haruslah bukan ternak, karena perlu diingat bahwa ternak merupakan unsur yang memberatkan, sehingga ternak dianggap barang khusus.

3) Penggelapan dengan pemberatan

Kejahatan penggelapan dengan pemberatan atau disebut juga "*gequalifierde verduistering*" tersebut diatur dalam pasal 374 KUHP.



Dalam Pasal 374 KUHP menyatakan bahwa penggelapan dengan pemberatan adalah penggelapan yang dilakukan oleh mereka yang menguasai suatu benda karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapatkan uang sebagai imbalannya.

Sedangkan dalam Pasal 375 KUHP menyatakan bahwa penggelapan dengan pemberatan adalah penggelapan yang dilakukan oleh mereka atas benda yang karena terpaksa telah titipkan kepadanya sebagai wali, curator, kuasa untuk mengurus harta benda orang lain, pelaksana suatu wasiat dan kedudukan mengurus benda amal atau yayasan.

4) Penggelapan sebagai delik aduan

Kejahatan sebagai delik aduan ini tersimpul dalam Pasal 376 KUHP yang mengacu pada Pasal 367 ayat (2) KUHP. Dengan adanya ketentuan ini berarti seseorang yang mempunyai hubungan keluarga melakukan penggelapan atau membantu melakukan penggelapan terhadap milik anggota keluarga lainnya yang tinggal dalam satu rumah hanya dapat dituntut terhadap mereka itu hanya dapat dilakukan apabila ada atau terdapat pengaduan dari pihak-pihak yang telah dirugikan karena kejahatan penggelapan.

5) Penggelapan oleh pegawai negeri karena jabatannya

Jenis penggelapan ini tidak diatur dalam Buku II Bab XXIV KUHP melainkan dalam Bab XXVIII yang mengatur mengenai apa yang disebut ” *ambtsmisdrijven* ” atau kejahatan jabatan. Penggelapan yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri dalam jabatannya disebut penggelapan jabatan.

Ketentuan mengenai penggelapan jabatan ini diatur dalam Pasal 415 dan Pasal 417 KUHP yang mengatur tentang seorang pegawai negeri yang karena jabatannya uang atau kertas berharga yang dalam

jabatannya menguasai benda-benda tersebut membiarkan diambil atau digelapkan oleh orang lain.

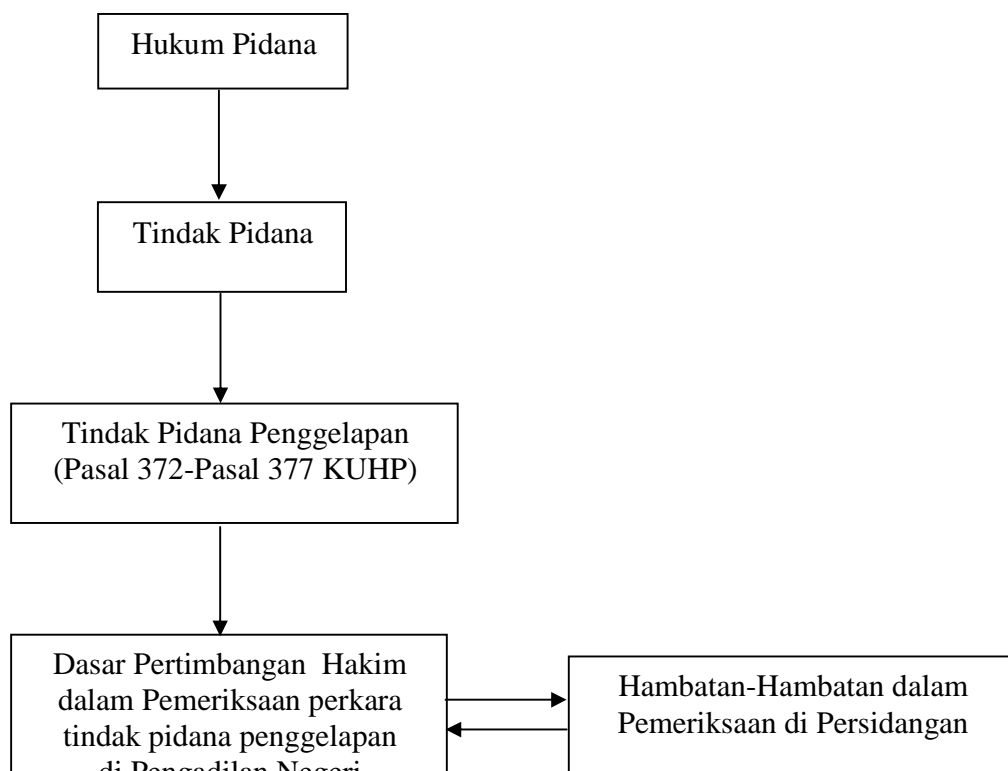
#### 4. Tinjauan Umum tentang Kendaraan Bermotor Roda Dua.

##### Pengertian Kendaraan Bermotor Roda Dua

Kendaraan atau angkutan adalah alat transportasi selain makhluk hidup. Mereka biasanya buatan manusia (mobil, motor, kereta, perahu, pesawat), tetapi bukan buatan manusia juga bisa disebut kendaraan, seperti gunung es, dan batang pohon yang mengambang. Kendaraan tidak bermotor dapat digerakan oleh manusia atau ditarik oleh hewan, seperti gerobak.

Kendaraan Bermotor roda dua adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih, yang digunakan didarat untuk mengangkut orang dan atau barang, yang digerakkan oleh motor, dengan menggunakan bahan bakar bensin, solar, gas, minyak tanah, campuran bensin dengan minyak lain atau bahan bakar lainnya. Pemilik Kendaraan Bermotor adalah orang atau badan/badan hukum yang namanya tercantum didalam Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan.

#### B. Kerangka Pemikiran



### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Hasil Penelitian**

###### **Kasus Posisi**

Pengadilan Negeri Sukoharjo merupakan Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memutus perkara tindak pidana paenggelapan kendaraan bermotor terhadap korban YUDIONO dengan terdakwa BAYU SETYAWAN bin alm. SLAMET

SETYAWAN yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo. Dalam kasus ini akan dianalisis tentang dasar pertimbangan Hakim dalam pemeriksaan perkara tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor dan hambatan-hambatan apa saja yang ditemui dalam melakukan penanganan perkara tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo.

Hasil penelitian menyatakan bahwa saat ini tindak pidana penggelapan semakin banyak terjadi di dalam masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan dengan meningkatnya jumlah laporan dari masyarakat kepada pihak Kepolisian mengenai kehilangan benda karena penggelapan dan juga jumlah perkara yang disidangkan di pengadilan.

Adapun sebagai contoh kasus tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor yang terjadi di Sukoharjo adalah sebagai bahan penelitian ini adalah kasus No.53/Pid.B/2008/PN.Skh. Pengadilan Negeri Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan seperti berikut, dalam perkaranya Terdakwa :

Nama Lengkap : BAYU SETIYAWAN bin alm SLAMET SETIAWAN

Tempat Lahir : Surakarta

Umur / Tgl Lahir : 26 tahun / 23 Nopember 1982

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Kp Jajar RT 03 / 003, Kel Jajar, Kec Laweyan,  
Kota Surakarta

Agama : I s l a m

Pekerjaan : S w a s t a .

MENUNTUT

1. Menyatakan terdakwa Bayu Setiawan bin alm Slamet Setiawan bersalah melakukan tindak pidana “ Penggelapan “ sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 372 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Bayu Setiawan bin alm Slamet Setiawan dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
1 ( satu ) unit sepeda motor merk Yamaha Vega New DB Tahun 2006 No Pol AD-6797-BK atas nama Slamet Setiawan berikut STNK-nya  
Dikembalikan kepada yang berhak, yakni saksi Yudiono ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah);

#### DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa Bayu Setiawan bin alm Slamet Setiawan pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2007 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2007, bertempat di Dukuh Gantungan RT 01/04 Kelurahan Makamhaji Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- a Ketika terdakwa berada di Kel. Sumber Kec. Banjarsari Kota Surakarta sedang bermain judi dadu, namun pada saat itu terdakwa kalah, kemudian terdakwa meminjam uang kepada saksi Agus Supriyadi als. Blembong sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan melanjutkan bermain judi dadu, kemudian terdakwa kalah lagi dan terdakwa meminta

kepada saksi Agus Supriyadi als. Blembong untuk mengantarkan ke rumah saksi Agus Rahadi dan sesampainya di rumah saksi Agus Rahadi terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Agus Rahadi, setelah mendapat pinjaman uang , kemudian terdakwa bermain judi dadu lagi dan kalah, selanjutnya terdakwa bersama saksi Agus Supriyadi als. Blembong datang ke rumah orang tua terdakwa di Dukuh Gantungan RT 01/04 Kelurahan Makamhaji Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo dan bertemu dengan adiknya saksi Nita Yulianningsih, kemudian terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Yudiono dengan alasan untuk pergi ke Sragen dan akan dikembalikan pada malam harinya, karena terdakwa sudah sering meminjam sepeda motor kemudian adiknya saksi Nita Yulianingsih menyerahkan sepeda motor merk Yamaha Vega New DB No Pol AD-6797-BK beserta STNK-nya kepada terdakwa .

- b Selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi Agus Rahadi dengan diikuti oleh saksi Agus Supriyadi als. Blembong dan mengatakan kepada saksi Agus Rahadi untuk mencarikan uang dengan menggadaikan sepeda motor Yamaha Type Vega New DB No Pol AD-6797-BK tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Agus Rahadi menjawab “ Nanti saya usahakan “, setelah itu saksi meninggalkan sepeda motor tersebut di rumah saksi Agus Rahadi dan meminta saksi Agus Supriyadi als. Blembong untuk mengantarkan terdakwa ke Kelurahan Sumber Kec Banjarsari Kota Surakarta tempat diadakannya permainan judi dadu, setelah sampai ke tempat permainan judi dadu tersebut, kemudian menyuruh saksi Agus Supriyadi als. Blembong untuk kembali ke rumah saksi Agus Rahadi untuk mengambilkan uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut dan tidak berapa lama kemudian saksi Agus Rahadi dan saksi Agus Supriyadi als.

Blembong datang dan menemui terdakwa dan saksi Agus Supriyadi als. Blembong menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sambil mengatakan kepada terdakwa bahwa sepeda motornya digadaikan kepada saudara Yoga (belum tertangkap) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun oleh saudara Yoga memotong uang jasa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan saksi Agus Rahadi memotong sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk mengembalikan pinjaman, kemudian terdakwa mengembalikan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Agus Supriyadi als. Blembong sehingga uang hasil dari menggadaikan sepeda motor tersebut sisa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa gunakan untuk bermain judi dadu lagi akan tetapi terdakwa kalah lagi .

- c Pada hari Jum'at tanggal 4 Januari 2008 terdakwa bertemu dengan saksi Yudiono di Kelurahan Jajar Kec. Laweyan Kota Surakarta dan saat itu saksi Yudiono menanyakan keberadaan sepeda motornya dan terdakwa menjawab sepeda motor saksi Yudiono terdakwa gadaikan dan terdakwa berjanji akan menebusnya pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2008, namun sampai saat ini sepeda motor milik saksi Yudiono belum terdakwa tebus .
- d Akibat perbuatan terdakwa saksi Yudiono mengalami kerugian sekitar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) .

Bahwa ia terdakwa Bayu Setiawan bin alm Slamet Setiawan pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2007 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2007, bertempat di Dukuh Gantungan RT 01/04 Kelurahan Makamhaji Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, dengan maksud untuk

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- a Ketika terdakwa berada di Kel. Sumber Kec. Banjarsari Kota Surakarta sedang bermain judi dadu, namun pada saat itu terdakwa kalah, kemudian terdakwa meminjam uang kepada saksi Agus Supriyadi als. Blembong sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan melanjutkan bermain judi dadu, kemudian terdakwa kalah lagi dan terdakwa meminta kepada saksi Agus Supriyadi als. Blembong untuk mengantarkan ke rumah saksi Agus Rahadi dan sesampainya di rumah saksi Agus Rahadi terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Agus Rahadi, setelah mendapat pinjaman uang , kemudian terdakwa bermain judi dadu lagi dan kalah, selanjutnya terdakwa bersama saksi Agus Supriyadi als. Blembong datang ke rumah orang tua terdakwa di Dukuh Gantungan RT 01/04 Kelurahan Makamhaji Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo dan bertemu dengan adiknya saksi Nita Yulianningsih, kemudian terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Yudiono dengan alasan untuk pergi ke Sragen dan akan dikembalikan pada malam harinya, karena terdakwa sudah sering meminjam sepeda motor kemudian adiknya saksi Nita Yulianingsih menyerahkan sepeda motor merk Yamaha Vega New DB No Pol AD-6797-BK beserta STNK-nya kepada terdakwa .
- b Selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi Agus Rahadi dengan diikuti oleh saksi Agus Supriyadi als. Blembong dan mengatakan kepada saksi Agus Rahadi untuk mencarikan uang dengan menggadaikan sepeda motor Yamaha Type Vega New DB No Pol AD-



6797-BK tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Agus Rahadi menjawab “ Nanti saya usahakan “, setelah itu saksi meninggalkan sepeda motor tersebut di rumah saksi Agus Rahadi dan meminta saksi Agus Supriyadi als. Blembong untuk mengantarkan terdakwa ke Kelurahan Sumber Kec Banjarsari Kota Surakarta tempat diadakannya permainan judi dadu, setelah sampai ke tempat permainan judi dadu tersebut, kemudian menyuruh saksi Agus Supriyadi als. Blembong untuk kembali ke rumah saksi Agus Rahadi untuk mengambilkan uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut dan tidak berapa lama kemudian saksi Agus Rahadi dan saksi Agus Supriyadi als. Blembong datang dan menemui terdakwa dan saksi Agus Supriyadi als. Blembong menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sambil mengatakan kepada terdakwa bahwa sepeda motornya digadaikan kepada saudara Yoga (belum tertangkap) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun oleh saudara Yoga memotong uang jasa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan saksi Agus Rahadi memotong sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk mengembalikan pinjaman, kemudian terdakwa mengembalikan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Agus Supriyadi als. Blembong sehingga uang hasil dari menggadaikan sepeda motor tersebut sisa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa gunakan untuk bermain judi dadu lagi akan tetapi terdakwa kalah lagi .

- c Pada hari Jum'at tanggal 4 Januari 2008 terdakwa bertemu dengan saksi Yudiono di Kelurahan Jajar Kec. Laweyan Kota Surakarta dan saat itu saksi Yudiono menanyakan keberadaan sepeda motornya dan terdakwa menjawab sepeda motor saksi Yudiono terdakwa gadaikan dan terdakwa

berjanji akan menebusnya pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2008, namun sampai saat ini sepeda motor milik saksi Yudiono belum terdakwa tebus .

- d Akibat perbuatan terdakwa saksi Yudiono mengalami kerugian sekitar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) .

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan serta menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi yang didengar keterangannya di depan persidangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya yang bernama :

1. YUDIONO

2. AGUS SUPRIYADI als BLEBONG

3. NITA YULIANINGSIH, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Y U D I O N O :

- a Bahwa saksi kenal dengan terdakwa (saksi adik ipar terdakwa) ;
- b Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan semua keterangan yang saksi berikan kepada Polisi benar adanya ;
- c Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2007 di rumah saksi di Dk Gantungan RT 01 / 04 Kl Makamhaji Kec Kartasura Kab Sukoharjo sekitar jam 14.30 WIB sepulang saksi menghadiri resepsi di rumah tetangga sepeda motor saksi tidak ada di rumah karena dipinjam oleh terdakwa dengan alasan untuk keperluan ke Sragen dan akan dikembalikan pada malam hari nanti tetapi ternyata setelah

malam hari sepeda motor saksi tidak dikembalikan oleh terdakwa bahkan sampai hari Sabtu tanggal 5 Januari 2008 di mana terdakwa sanggup mengembalikan tetapi ternyata tidak dikembalikan ;

- d Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor saksi tersebut melalui isteri saksi yang bernama Nita Yulianingsih (adik terdakwa) ;
- e Bahwa sepeda motor saksi tidak segera dikembalikan tersebut karena oleh terdakwa digadaikan senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- f Bahwa harga sepeda motor saksi tersebut sekitar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ;
- g Bahwa sepeda motor saksi dapat diketemukan karena penggadainya datang ke rumah saksi menyerahkan sepeda motor dan STNK-nya dan kemudian sepeda motor beserta STNK-nya oleh saksi diserahkan ke Kantor Polisi Sektor Kartasura untuk digunakan sebagai barang bukti ;
- h Bahwa atas barang-barang bukti yang diperlihatkan di persidangan saksi menyatakan kenal dan membenarkan ;

2. Saksi AGUS SUPRIYADI als BLEMBONG :

- a Bahwa saksi kenal dengan terdakwa (saksi teman terdakwa) ;
- b Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan semua keterangan yang saksi berikan kepada Polisi benar adanya ;
- c Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2007 sekitar jam 09.00 WIB terdakwa meminjam uang kepada saksi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut oleh terdakwa digunakan untuk main judi Dadu di daerah Sumber Kec Banjarsari Kota Surakarta, terdakwa kalah ;
- d Bahwa sekitar jam 10.00 WIB terdakwa meminta kepada saksi supaya mengantarkan terdakwa ke rumahnya Agus Rahadi di Kp Pajangan RT 05 / VIII K1 Pajang Kec Laweyan Kota Surakarta untuk meminjam

uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan setelah terdakwa mendapatkan pinjaman uang tersebut terdakwa meminta kepada saksi supaya mengantarkan kembali ke tempat permainan judi Dadu di daerah Sumber tadi, terdakwa kalah lagi ;

- e Bahwa sekitar jam 14.00 WIB terdakwa meminta lagi kepada saksi supaya mengantarkan ke rumah orang tuanya di Dk Gantungan RT 01 / 04 Kl Makamhaji Kec Kartasura Kab Sukoharjo menemui adiknya yang bernama Nita Yulianingsih dan meminajm sepeda motor milik saksi I dengan alasan untuk pergi ke Sragen ;
- f Bahwa setelah mendapatkan sepeda motor milik saksi I tersebut terdakwa pergi bersama saksi ke rumah Agus Rahadi dan meminta tolong kepadanya supaya dicarikan pinjaman uang dengan jaminan sepeda motor milik saksi I tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dadn oleh Agus Rahadi sepeda motor milik saksi I tersebut digadaikan kepada Yoga ;
- g Bahwa setelah saksi menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari hasil menggadaikan sepeda motor milik saksi I tersebut setelah dipotong uang jasa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), mengembalikan pinjaman kepada Agus Rahadi sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupia ) dan mengembalikan pinjaman kepada saksi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa melanjutkan kembali main judi Dadu, saksi terus pulang ke rumah ;
- h Bahwa saksi tidak tahu terdakwa ijin atau tidak kepada adiknya kalau sepeda motor milik saksi I tersebut mau digadaikan ;
- i Bahwa yang menebus sepeda motor milik saksi I tersebut adalah saksi dengan maksud supaya sepeda motor milik saksi I cepat kembali ;

- j Bahwa atas barang-barang bukti yang diperlihatkan di persidangan saksi menyatakan kenal dan membenarkan ;

3. Saksi NITA YULIANINGSIH :

- a Bahwa saksi kenal dengan terdakwa (saksi adik kandung terdakwa);
- b Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan semua keterangan yang saksi berikan kepada Polisi benar adanya ;
- c Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2007 di rumah saksi di Dk Gantungan RT 01 / 04 Kl Makamhaji Kec Kartasura Kab Sukoharjo sekitar jam 14.00 WIB terdakwa datang bersama saksi II (Agus Supriyadi als Blembong) dan meminjam sepeda motor milik saksi I (suami saksi) dengan alasan untuk keperluan ke Sragen dan akan dikembalikan pada malam hari nanti tetapi setelah malam hari ternyata sepeda motor tidak dikembalikan, bahkan sampai hari Sabtu tanggal 5 Januari 2008 di mana terdakwa sanggup mengembalikan ternyata tidak dikembalikan ;
- d Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2008 saksi I (suami saksi) melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi untuk pengusutan lebih lanjut ;
- e Bahwa sepeda motor suami saksi oleh terdakwa dibawa pergi ke Sragen atau tidak saksi tidak tahu ;
- f Bahwa sepeda motor suami saksi tersebut oleh terdakwa digadaikan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- g Bahwa sepeda motor suami saksi tersebut ketemu karena penggadainya datang ke rumah saksi menyerahkan sepeda motor beserta STNK-nya dan kemudian oleh suami saksi sepeda motor beserta STNK-nya diserahkan ke Kantor Polisi Sektor Kartasura untuk digunakan sebagai barang bukti ;

- h Bahwa pada waktu terdakwa meminjam sepeda motor suami saksi tersebut, terdakwa tidak mengatakan ataupun ijin kepada saksi kalau sepeda motor tersebut mau digadaikan ;
- i Bahwa sebelum ada kejadian ini terdakwa memang sering meminjam sepeda motor suami saksi tersebut ;
- j Bahwa atas barang-barang bukti yang diperlihatkan di persidangan saksi menyatakan kenal dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum benar ;
- b. Bahwa keterangan saksi-saksi di Persidangan benar ;
- c. Bahwa keterangan terdakwa di depan penyidik benar ;
- d. Bahwa benar terdakwa pinjam sepeda motor Yamaha Type Vega New DB No Pol AD-6797-BK milik YUDIONO berikut STNKnya dengan alasan untuk pergi ke rumah paman mereka di Sragen.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan terdakwa di Persidangan menyatakan membenarkan adanya.

Menimbang, bahwa selengkapny terjadi hal-hal di persidangan seperti tertera dalam Berita Acara Persidangan perkara ini untuk mempersingkat dianggap termuat dalam uraian putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur perbuatan pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atas diri terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif, yakni melanggar ketentuan pasal 372 KUHP atau pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan melanggar pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Barang siapa ” di sini adalah orang ( persoon ) selaku subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan orang tersebut sehat jasmani dan rohaninya serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa orang selaku subyek hukum dalam perkara ini adalah terdakwa Bayu Setiawan bin ( alm ) Slamet Setiawan, di mana identitasnya setelah diperiksa dan ditanyai di persidangan ternyata cocok dan sesuai dengan identitas terdakwa yang terdapat dalam berkas perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Yudiono, Agus Supriyadi als Blembong dan Nita Yulianingsih, dan pengakuan terdakwa sendiri di persidangan, bahwa benar terdakwalah orangnya yang melakukan tindak pidana yang dimaksud dan bukan *error in persona*, dan terdakwa sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur “ Barang siapa “ telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Yudiono, Agus Supriyadi als Blembong, Nita Yulianingsih dan pengakuan terdakwa sendiri di persidangan, serta dikaitkan dengan barang-barang bukti , maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- a Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2007 sekitar jam 14.00 WIB bertempat di rumah orang tua terdakwa di Dk Gantungan RT 01 / 04 Kel Makamhaji, Kec Kartasura, Kab Sukoharjo terdakwa meminjam sebuah sepeda motor merk Yamaha Type Vega New DB Tahun 2006 No Pol AD-6797-BK beserta STNK-nya kepada saksi Nita Yulianingsih adik terdakwa sendiri ;
- b Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi Nita Yulianingsih adiknya dengan alasan untuk pergi ke rumah paman mereka di Sragen ;
- c Bahwa setelah sepeda motor tersebut dipinjamkan oleh adiknya saksi Nita Yulianingsih, sepeda motor tersebut bukannya dipakai terdakwa untuk menemui pamannya di Sragen, tetapi digadaikan oleh terdakwa kepada Yoga (belum tertangkap) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui Agus Rahadi dan oleh Agus Rahadi dipotong sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang jasa, dan uang tersebut oleh terdakwa dipakai untuk membayar hutang kepada Agus Rahadi sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan membayar hutang kepada Agus Supriyadi als Blembong sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sisanya dipakai untuk main judi Dadu ;
- d Bahwa sepeda motor merk Yamaha tersebut seluruhnya adalah milik saksi Yudiono dan isterinya saksi Nita Yulianingsih (adik terdakwa) yang dulunya dibeli dari orang tua mereka Slamet Seiawan sekarang



sudah meninggal dunia, tetapi sepeda motor tersebut masih atas nama alm Slamet Setiawan ;

- e Bahwa terdakwa pergi meminjam sepeda motor tersebut diantar oleh saksi Agus Supriyadi als Blembong ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dan kemudian menggadaikannya kepada Yoga, dan uangnya terdakwa pakai untuk membayar hutang-hutangnya dan sisanya terdakwa pakai untuk bermain judi Dadu. Dalam hal ini sepeda motor tersebut seolah-olah milik terdakwa sendiri, padahal barang tersebut seluruhnya adalah milik saksi Yudiono.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka “ Unsur dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain “ telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

Ad. 3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Yudiono, Agus Supriyadi als Blembong, Nita Yulianingsih dan pengakuan terdakwa sendiri di persidangan, serta dikaitkan dengan barang-barang bukti , maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- a Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2007 sekitar jam 14.00 WIB bertempat di rumah orang tua terdakwa di Dk Gantungan RT 01 / 04 Kel Makamhaji, Kec Kartasura, Kab Sukoharjo terdakwa meminjam sebuah sepeda motor merk Yamaha Type Vega New DB Tahun 2006 No Pol AD-6797-BK beserta STNK-nya kepada saksi Nita Yulianingsih adik terdakwa sendiri dengan alasan mau dipakai untuk menemui paman mereka ( terdakwa dan Nita Yulianingsih ) di Sragen ;

- b Bahwa atas permintaan terdakwa tersebut, adiknya saksi Nita Yulianingsih meminjamkannya secara baik tanpa rasa curiga sebab yang meminjam adalah kakak kandung sendiri ;
- c Bahwa sepeda motor Yamaha tersebut berada dalam tangan terdakwa adalah dengan cara meminjam dan dipinjamkan oleh adiknya Nita Yulianingsih, dan bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka “ Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan “ telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari pasal 372 KUHP telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penggelapan “.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif dan dakwaan Kesatu tersebut telah terbukti, maka dakwaan Kedua melanggar ketentuan pasal 378 KUHP tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemui adanya alasan-alasan pembenar dan pemaaf atas diri terdakwa yang sifatnya dapat menghapus pidananya terdakwa, maka pidana tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Yamaha Vega New DB Tahun 2006 No Pol.AD-6797-BK atas nama Slamet Setiawan berikut STNK-nya.

Di persidangan terungkap bahwa barang bukti tersebut adalah kepunyaan saksi Yudiono, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Yudiono.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah maka terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- a. Akibat dari perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi orang lain terutama saksi Yudiono dan isterinya saksi Nita Yulianingsih ;
- b. Perbuatan terdakwa meresahkan warga sekitarnya ;
- c. Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.

Hal-hal yang meringankan :

- a. Terdakwa belum pernah dihukum ;
- b. Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- c. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi di masa-masa mendatang ;

Memperhatikan ketentuan pasal 372 KUHP dan Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa BAYU SETIAWAN bin ( alm ) SLAMET SETIYAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ Penggelapan “ ;
2. Memidana terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

- 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Yamaha Vega New DB Tahun 2006 No Pol.AD-6797-BK atas nama Slamet Setiawan berikut STNK-nya ;

Dikembalikan kepada saksi Yudiono ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

## **B. Pembahasan**

### **1. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Pemeriksaan perkara Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor**

Berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan pemeriksaan barang bukti maka telah ditemukan fakta hukum bahwa terdakwa BAYU SETIYAWAN telah terbukti melakukan tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor.

Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Terdakwa melanggar Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

#### **a). Unsur Barang Siapa**

Bahwa yang dimaksud dengan “ Barang siapa ” di sini adalah orang (persoon) selaku subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan orang tersebut sehat jasmani dan rohaninya serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.

Dalam perkara ini yang menjadi orang selaku subyek hukum adalah terdakwa Bayu Setiyawan bin ( alm ) Slamet Setiawan, di mana identitasnya setelah diperiksa dan ditanyai di persidangan ternyata cocok dan sesuai dengan identitas terdakwa yang terdapat dalam berkas perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Yudiono, Agus Supriyadi als Blembong dan Nita Yulianingsih, dan pengakuan terdakwa sendiri di persidangan, bahwa benar terdakwalah orangnya yang melakukan tindak pidana yang dimaksud dan bukan *error in persona*, dan terdakwa sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Berdasarkan pertimbangan di atas,

maka unsur “ Barang siapa “ telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

b). Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan yang dikehendaki dan mengetahui akibatnya. Ada 2 ( dua ) macam kesengajaan yaitu :

(1). Kesengajaan Formal yaitu kesengajaan yang ditujukan pada perbuatannya.

Dalam hal ini terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dengan cara meminjam sepeda motor merk Yamaha Type Vega new DB No.Pol. AD 6797 BK beserta STNKnya kepada saksi Nita Yulianingsih adiknya dengan alasan untuk pergi kerumah paman mereka di Sragen, kemudian menggadaikannya kepada Yoga, dan uangnya terdakwa pakai untuk membayar hutang-hutangnya dan sisanya terdakwa pakai untuk bermain judi Dadu.

(2). Kesengajaan Material yaitu kesengajaan yang ditujukan pada akibatnya.

Dalam hal ini perbuatan Terdakwa yang menggelapkan sepeda motor merk Yamaha Type Vega new DB No.Pol. AD 6797 BK mengakibatkan saksi Yudiono yang merupakan pemilik sepeda motor tersebut mengalami kerugian sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Ada 3 (tiga) macam corak kesengajaan, yaitu ditinjau dari sikap batinnya, yang menunjukkan 3 (tiga) tingkat kesengajaan, ialah:

(1). Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan yang langsung (dolus directus)

Corak kesengajaan ini adalah perbuatan pelaku memang dikehendaki dan ia juga mengetahui akibatnya yang dilarang.

(2). Kesengajaan dengan sadar kepastian

Corak kesengajaan ini bersandar pada akibatnya. Akibat ini bisa merupakan delik tersendiri, disamping akibat tersebut di atas terdapat akibat lain yang sebenarnya tidak diinginkan, tidak dimaksudkan tetapi pasti terjadi.

(3). Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis)

Corak kesengajaan ini kadang disebut sebagai “kesengajaan dengan syarat” dimana pelaku melakukan suatu perbuatan dengan maksud untuk menimbulkan akibat tertentu.

Dalam perkara tindak penggelapan ini termasuk dalam kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan yang langsung, yaitu terdakwa Bayu Setiyawan melakukan tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor dengan cara meminjam kendaraan bermotor merk Yamaha type Vega New DB NoPol. AD 6797 BK kepada saksi Nita Yulaningsih adiknya dengan maksud untuk mendapat uang secara langsung dan cepat yang dapat digunakan untuk membayar hutang-hutangnya dan untuk bermain judi dadu lagi.

Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang diancam dengan pidana apabila tidak ada alasan pembenar dan dirumuskan dalam Undang-Undang yang tertulis misalnya KUHP. Dalam perkara ini Terdakwa melanggar Pasal 372 KUHP dan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan yang mana Terdakwa telah menggelapkan sepeda motor milik saksi Yudiono.

Sedangkan memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dalam perkara ini Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dan kemudian menggadaikannya kepada Yoga, dan uangnya terdakwa pakai untuk membayar hutang-hutangnya dan sisanya terdakwa pakai untuk bermain judi Dadu. Dalam hal ini sepeda motor tersebut seolah-olah milik

terdakwa sendiri, padahal barang tersebut seluruhnya adalah milik saksi Yudiono.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka “ Unsur dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain “ telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

c). Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Yudiono, Agus Supriyadi als Blembong, Nita Yulianingsih dan pengakuan terdakwa sendiri di persidangan, serta dikaitkan dengan barang-barang bukti , maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- a) Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2007 sekitar jam 14.00 WIB bertempat di rumah orang tua terdakwa di Dk Gantungan RT 01 / 04 Kel Makamhaji, Kec Kartasura, Kab Sukoharjo terdakwa meminjam sebuah sepeda motor merk Yamaha Type Vega New DB Tahun 2006 No Pol AD-6797-BK beserta STNK-nya kepada saksi Nita Yulianingsih adik terdakwa sendiri dengan alasan mau dipakai untuk menemui paman mereka ( terdakwa dan Nita Yulianingsih ) di Sragen ;
- b) Bahwa atas permintaan terdakwa tersebut, adiknya saksi Nita Yulianingsih meminjamkannya secara baik tanpa rasa curiga sebab yang meminjam adalah kakak kandung sendiri ;
- c) Bahwa sepeda motor Yamaha tersebut berada dalam tangan terdakwa adalah dengan cara meminjam dan dipinjamkan oleh adiknya Nita Yulianingsih, dan bukan karena kejahatan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka “ Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan “ telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

Adapun dasar pertimbangan Hakim dalam pemeriksaan perkara tindak pidana penggelapan di Pengadilan Negeri Sukoharjo adalah sebagai berikut:

- (1) Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa terdakwa, Bayu Setiyawan, telah melakukan tindak pidana penggelapan terhadap saksi korban Yudiono berupa 1 unit sepeda motor Yamaha type Vega New DB No Pol AD 6797 BK.
- (2) Respon atau tanggapan dari terdakwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum mengenai pokok perkara yang didakwakan dan terdakwa Bayu Setiyawan menyatakan sudah mengerti dan tidak melakukan eksepsi.
- (3) Keterangan saksi-saksi di persidangan yang terdiri dari Yudiono (saksi korban), Agus Supriyadi dan Nita Yulianingsih, yang membenarkan bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan oleh Bayu Setiyawan terhadap Yudiono dengan sengaja.
- (4) Barang bukti perkara yang dihadirkan dalam persidangan yang memperkuat keterangan dari surat dakwaan maupun keterangan para saksi bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan dengan unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Bayu Setiyawan terhadap Yudiono.
- (5) Kesenambungan, kesesuaian, dan hubungan antara fakta-fakta hukum yang terungkap di pengadilan.
- (6) Hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa selama pemeriksaan tindak pidana penggelapan.
- (7) Keterangan dari terdakwa mengenai kebenaran tindak pidana penggelapan yang dilakukannya.

## 2. Hambatan-hambatan dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana

Penggelapan Kendaraan Bermotor di Pengadilan Negeri Sukoharjo



Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sapta Diharja, S.H., M.Hum. yang merupakan salah satu Hakim yang menangani perkara tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor di Pengadilan Negeri Sukoharjo, maka penulis memperoleh keterangan bahwa pemeriksaan perkara tindak pidana penggelapan di Pengadilan Negeri Sukoharjo tidak selalu berjalan lancar dan mulus. Pada setiap tahap pemeriksaan perkara tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor selalu terdapat hambatan-hambatan dalam pemeriksaan perkara tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor.. Hambatan-hambatannya berupa sulitnya menghadirkan saksi yang mengetahui kejadian pelaku atau terdakwa dalam mendapatkan barangnya dan pembuktian barang ditangan pelaku atau terdakwa bukan karena kejahatan.

Kasus tindak pidana penggelapan seperti yang dilakukan oleh Bayu Setiyawan di dalam tahap pemeriksaan di persidangan selalu mengalami hambatan-hambatan yaitu :

- a). Sulitnya menghadirkan saksi yang mengetahui kejadian pelaku atau terdakwa dalam mendapatkan barangnya.

Bahwa sulitnya menghadirkan saksi yang mengetahui kejadian pelaku dalam mendapatkan barangnya dikarenakan pada saat terjadinya tindak pidana penggelapan biasanya hanya ada korban dan pelaku. Dan juga kesadaran hukum masyarakat masih rendah di mana orang merasa bersidang di pengadilan merupakan hal yang tabu sehingga terkadang ada orang yang mengetahui kejadian tindak pidana penggelapan tapi enggan untuk bersaksi di pengadilan.

- b). Pembuktian barang ditangan pelaku atau terdakwa bukan karena kejahatan.

Pembuktian barang ditangan pelaku bukan karena kejahatan biasanya pelaku dalam mendapatkan barangnya dengan cara meminjam dan

dipinjamkan oleh korban, namun saat mengembalikan pelaku tidak datang dan tidak mengembalikan barangnya.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil pengamatan dan pembahasan yang telah diuraikan dan dijelaskan diatas, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Dasar pertimbangan yang digunakan Hakim di dalam pemeriksaan perkara tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor meliputi : Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tanggapan terdakwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan para saksi, barang bukti perkara yang dihadirkan di dalam persidangan, kesinambungan, kesesuaian dan hubungan antara fakta-fakta hukum dan keterangan antar saksi, hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari si terdakwa, dan keterangan terdakwa tentang kebenaran tindak pidana yang dilakukan. Sedangkan hambatan-hambatan dalam pemeriksaan perkara tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor adalah sulitnya menghadirkan saksi yang mengetahui kejadian pelaku atau terdakwa dalam mendapatkan barangnya dan pembuktian barang ditangan pelaku atau terdakwa bukan karena kejahatan.
2. Penanganan kasus tindak pidana penggelapan secara umum tidak mengalami hambatan yang berarti mengingat bahwa penanganan kasus berjalan dengan baik dan mampu menghasilkan suatu keputusan yang sesuai dengan asas keadilan bagi pihak-pihak yang bersengketa.

## **B. Saran**

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Bagi Aparat penegak hukum terutama Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan agar lebih memperhatikan faktor pembuktian barang ditangan pelaku bukan karena kejahatan dan faktor kesengajaan dari pelaku dalam melakukan tindak pidana penggelapan.
2. Bagi masyarakat yang mengetahui kejadian tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor dan mengetahui kejadian pelaku dalam mendapatkan barangnya hendaknya mau memberikan kesaksian dipersidangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

Andi Hamzah. 1994. *Azas-azas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta : Rineka Cipta.

Adam Chazawi. 2001. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Bambang Poernomo. 1985. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta : Ghalia Indonesia

Bambang Waluyo . 2002 . *Penelitian Hukum Dalam Praktek* . Jakarta. Sinar Grafika.

Moeljatno. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.

P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Sinar Baru.

Rofikah. 1999. *Hukum Pidana*. FH UNS. Surakarta.

R. Soesilo. 1984. *Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*. Politea : Bogor.

Soemitro. 1996. *Hukum Pidana*. FH UNISRI. Surakarta.

Soerdjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia Press.

Wirjono prodjodikoro. 1986. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

### Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

### Dari Internet :

[http://www.google.com/materi/kendaraan bermotor.](http://www.google.com/materi/kendaraan_bermotor) ( 27 Juli 2008 pukul 09.00 WIB  
).